

**RENSTRA 2015-2019**  
**KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Lampiran II : Rekap Renstra 2015-2019 (Fisik dan alokasi anggaran dalam ribuan)

No	Sasaran Program	Kegiatan	Satuan	Tahun					jumlah
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Terciptanya Organisasi Yang Adaptif dan Akuntabel			65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	325.000.000
		a. Jumlah laporan perencanaan program dan anggaran	Dokumen	1	1	1	1	1	5
		b. Jumlah laporan pengelolaan anggaran dan BMN	Laporan	1	1	1	1	1	5
		c. Jumlah laporan kepegawaian	Laporan	1	1	1	1	1	5
		d. Jumlah laporan hasil survey pengukuran dan pemetaan-hak tanah dan pendaftaran tanah -Pengaturan dan Penataan pertanahan -Pengendalian pertanahan dan Pemberdayaan masyarakat -Pengkajian penanganan sengketa dan konflik pertanahan	Laporan	1	1	1	1	1	5
		e. Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan	Laporan	1	1	1	1	1	5
		f. Jumlah peningkatan kapasitas SDM perencanaan program dan anggaran BPN di daerah	Orang	2	2	2	2	2	10
		g. Jumlah laporan Keikut sertaan Diklat-Diklat	Orang	5	5	5	5	5	25
		h. Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	12	12	12	12	12	60
		i. Jumlah laporan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60
		j. Jumlah kendaraan bermotor							

		k. Jumlah perangkat pengolah dan Komunikasi	Unit	20	20	20	20	20	100	
		l. Jumlah Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	200	200	200	200	200	1.000	
		m. Jumlah Gedung/Bangunan	Unit M2	500 5.000	500 5.000	500 5.000	500 5.000	500 5.000	2.500 15.000	
2	Meningkatnya Kepastian Letak Batas dan Luas Bidang Tanah Yang Mendukung Penegakan Hukum				16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.00.000	80.000.000
		a. Jumlah Peta Dasar Pertanahan	Peta	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	
		b. Jumlah Peta Tematik sosial ekonomi pertanahan	Peta	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	
		c. Bimtek pemetaan dasar	Orang	100	100	100	100	100	500	
		d. Jumlah pemetaan tematik bidang skala 1:2.500 (ha)	Ha	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	
		e. Jumlah layanan pemetaan Tematik bidang tanah untuk pemecahan sertipikat Skala 1:1.000	Bidang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	
		f. Jumlah pemetaan tematik bidang skala 1:10.000 (ha)	Ha	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	
		g. Jumlah layanan pengukuran dan Pemetaan batas bidang tanah	Bidang	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		h. Jumlah layanan pengukuran batas bidang tanah secara massal	Bidang	5000	5000	5000	5000	5000	25.000	
		i. Jumlah layanan pengembalian batas	Bidang	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.250	
3	Terwujudnya kepastian Hukum Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat penerima Redistribusi dan Legalisasi Asset.			30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	150.000.000
		a. Sertipikat Tanah Kategori II :								
		- Jumlah Sertipikat Prona	Bidang	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
		- Jumlah Sertipikat UKM	Bidang	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
		- Jumlah Sertipikat Nelayan	Bidang	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	8.000	
		- Jumlah Sertipikat Pertanian	Bidang	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

		- Transmigrasi	Bidang	500	500	500	500	500	2.500
		b. Sertipikat Tanah Barang Milik Negara Kategori III :							
		- Jumlah Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (s.d 25.000 m2) Kategori III	Bidang	30	30	30	30	30	150
		- Jumlah Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (s.d 25.001 m2 s.d 100.000 m2)	Bidang	50	50	50	50	50	250
		c. Layanan Pertanahan :							
		- Jumlah layanan pemeriksaan tanah panitia "B"	Bidang	50	50	50	50	50	250
		- Jumlah layanan pemeriksaan tanah panitia "A"	Bidang	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
		- Jumlah layanan pemeriksaan tanah panitia "A" massal	Bidang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
		- Jumlah layanan pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah	Bidang	300	300	300	300	300	1.500
		- Jumlah laporan pemeriksaan tanah oleh petugas Konstatasi	Bidang	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
		- Jumlah layanan pendaftaran tanah pertama kali	Bidang	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
		- Layanan data pendafaran tanah	Bidang	150.000	15.000	15.000	15.000	150.000	75.000
		- Layanan informasi data tekstual , grafikal,sertipikat.	Bidang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
		- Layanan penerbitan SKPT	Bidang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
		- Layanan pemisahan,pemecahan dan penggabungan	Bidang	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
		d. Jumlah laporan Fasilitasi dan Pendampingan Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor di Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	5
		e. Jumlah laporan Fasilitasi dan Pendampingan Sertipikasi Hak Atas Tanah							

		Lintas Sektor di Kantah	Laporan	14	14	14	14	14	70
		f. Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi asset melalui fasilitas akses ke sumber-sumber produksi dan ekonomi dalam rangka membangun dan mengembangkan akses reform di Kanwil BPN Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	5
		g. Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi asset melalui fasilitas akses ke sumber sumber produksi dan ekonomi dalam rangka membangun dan mengembangkan akses reform di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	Laporan	5	5	5	5	5	25
4	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat melalui Pengaturan dan Penataan Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah secara optimal			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	30.000.000
		a. Jumlah Data Tekstual dan Spasial P4TBidang Tanah Kategori II non kawasan	Bidang	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
		b. Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Kategori II revisi	Neraca	3	3	3	3	3	15
		c. Jumlah Inventarisasi Wilayah pesisir	Laporan	4	4	4	4	4	20
		d. Jumlah laporan inventarisasi pulau-pulau kecil	Laporan	2	2	2	2	2	10
		e. Jumlah Sertipikat Redistribusi TOL Kategori III	Bidang	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.250
		f. Jumlah Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori III	Satket	200	200	200	200	200	1.000
		g. Peta Potensi Objek Konsolidasi kategori II (sp)	Peta	4	4	4	4	4	20
		h. Jumlah layanan pertimbangan teknis							

		<p>pertanahan dalam rangka ijin perubahan penggunaan tanah</p> <p>i. Jumlah layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka ijin lokasi</p> <p>j. Neraca PGT Kecamatan</p> <p>k. Jumlah inventarisasi tanah Negara bekas hak, bekas kawasan</p>	<p>Dokumen</p> <p>Dokumen Neraca</p> <p>Laporan</p>	<p>100</p> <p>2.000</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>100</p> <p>2.000</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>100</p> <p>2.000</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>100</p> <p>2.000</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>100</p> <p>2.000</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>500</p> <p>10.000</p> <p>5</p> <p>5</p>
5	<b>Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum</b>			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
		<p>a. Jumlah Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:10.000</p> <p>b. Jumlah Pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah</p> <p>c. Usulan HPL (ha)</p> <p>d. Data base tanah instansi dan badan usaha pemerintah.</p>	<p>Peta</p> <p>Peta Ha</p> <p>Laporan</p>	<p>35.000</p> <p>150</p> <p>5.000</p> <p>1</p>	<p>35.000</p> <p>150</p> <p>5.000</p> <p>1</p>	<p>35.000</p> <p>150</p> <p>5.000</p> <p>1</p>	<p>35.000</p> <p>150</p> <p>5.000</p> <p>1</p>	<p>35.000</p> <p>150</p> <p>5.000</p> <p>1</p>	<p>175.000</p> <p>750</p> <p>25.000</p> <p>5</p>
6	<b>Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Terlantar</b>			1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	8.500.000
		<p>a. Jumlah Daftar Isian Tanah Terindikasi Terlantar oleh Kantor Wilayah BPN klas A1 seluas 0 s.d 25 ha</p> <p>b. Jumlah Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi terlantar oleh Panitia "C" klas A1 seluas 0 s.d 25 ha</p> <p>c. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evluasi pada akhir peringatan I klas A1 seluas 0 s.d 25 ha</p> <p>d. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pada akhir peringatan II klas A1 seluas 0 s.d 25 ha</p>	<p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>

		e. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pada akhir peringatan III klas A1 seluas 0 s.d 25 ha	Dokumen	2	2	2	2	2	10
		f. Jumlah usulan Penetapan Tanah Terlantar	Dokumen	2	2	2	2	2	10
		g. Jumlah laporan hasil pemutahiran data Tanah Terindikasi Terlantar di Kantor Wilayah	Dokumen	2	2	2	2	2	10
		h. Jumlah laporan hasil pemantauan dan pembinaan pertanahan di Kantor Wilayah	Dokumen	1	1	1	1	1	5
		i. Jumlah Inventarisasi dan identifikasi tanah yang terindikasi terlantar	Dokumen	1	1	1	1	1	5
		j. Jumlah laporan pengelolaan kendali mutu program pertanahan kanwil	Dokumen	1	1	1	1	1	5
		k. Jumlah laporan pengelolaan kendali mutu program pertanahan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1	5
		l. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pemberian hak dan perijinan di kantah	Dokumen	14	14	14	14	14	70
			Dokumen	14	14	14	14	14	70
			Dokumen	14	14	14	14	14	70
7	Berkurangnya Sengketa konflik dan Perkara Pertanahan				1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	9.000.000
		a. Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi Sengketa Konflik Perkara (SKP)	Pengaduan	15	15	15	15	15	75
		b. Jumlah laporan Pengkajian Kasus Pertanahan	Kasus	10	20	20	20	20	100
		c. Jumlah laporan Beracara di Pengadilan	Perkara		10	10	10	10	20
		d. Jumlah laporan kegiatan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Laporan	25	25	25	25	25	125
	<b>Jumlah Alokasi Anggaran (dalam ribuan)</b>				<b>121.500.000</b>	<b>121.500.000</b>	<b>121.500.000</b>	<b>121.500.000</b>	<b>607.500.000</b>







Tabel1. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target
1	Terciptanya Organisasi Yang Adaptif dan Akuntabel	1. Nilai Reformasi Birokrasi	85
		2. Nilai Laporan Kinerja	75
		3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP
		4. Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan.	90
		n. Jumlah laporan perencanaan program dan anggaran	1
		o. Jumlah laporan pengelolaan anggaran dan BMN	1
		p. Jumlah laporan kepegawaian	1
		q. Jumlah laporan hasil survey pengukuran dan pemetaan-hak tanah dan pendaftaran tanah -Pengaturan dan Penataan pertanahan - Pengendalian pertanahan dan Pemberdayaan masyarakat - Pengkajian penanganan sengketa dan konflik pertanahan	
		r. Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan	1
		s. Jumlah penikatan kapasitas SDM perencanaan program dan anggaran BPN di daerah	1
		t. Jumlah laporan Keikutsertaan Diklat- Diklat	1
		u. Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	1
		v. Jumlah laporan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan	12

		<ul style="list-style-type: none"> <li>perkantoran</li> <li>w. Jumlah kendaraan bermotor</li> <li>x. Jumlah perangkat pengolah dan Komunikasi</li> <li>y. Jumlah Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran</li> <li>z. Jumlah Gedung/Bangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>22</li> <li>107</li> <li>421</li> <li>5.844</li> </ul>
2	<b>Meningkatnya Kepastian Letak Batas dan Luas Bidang Tanah yang Mendukung penegakan Hukum</b>	1. Persentase Cakupan Bidang Tanah Terpetakan	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Jumlah Peta Dasar Pertanahan</li> <li>k. Jumlah Peta Tematik social ekonomi pertanahan</li> <li>l. Bimtek pemetaan dasar</li> <li>m. Jumlah pemetaan tematik bidang skala 1:2.500 (ha)</li> <li>n. Jumlah layanan pemetaan Tematik bidang tanah untuk pemecahan sertipikat Skala 1:1.000</li> <li>o. Jumlah pemetaan tematik bidang skala 1:10.000 (ha)</li> <li>p. Jumlah layanan pengukuran dan Pemetaan batas bidang tanah</li> <li>q. Jumlah layanan pengukuran batas bidang tanah secara massal</li> <li>r. Jumlah layanan pengembalian batas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000</li> <li>40.000</li> <li>86</li> <li>6.083</li> <li>3.201</li> <li>37.000</li> <li>39.726</li> <li>950</li> <li>2.451</li> </ul>

3	Terwujudnya kepastian Hukum Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat penerima Redistribusi dan Legalisasi Asset.	1. Persentase peningkatan tanah dan ruang yang terdaftar	
		2. Jumlah masyarakat pemilik sertipikat yang menerima fasilitas akses reform	
		h. Sertipikat Tanah Kategori II :	
		- Jumlah Sertipikat Prona	13.000
		- Jumlah Sertipikat UKM	1.900
		- Jumlah Sertipikat Nelayan	1.100
		- Jumlah Sertipikat Pertanian	2.665
		- Transmigrasi	400
		i. Sertipikat Tanah Barang Milik Negara Kategori III :	
		- Jumlah Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (s.d 25.000 m2) Kategori III	50
		- Jumlah Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (s.d 25.001 m2 s.d 100.000 m2)	25
		j. Layanan Pertanahan :	25
		- Jumlah layanan pemeriksaan tanah panitia "B"	
		- Jumlah layanan pemeriksaan tanah panitia "A"	50
		- Jumlah layanan pemeriksaan tanah panitia "A" massal	7.511
		- Jumlah layanan pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah	850
		- Jumlah laporan pemeriksaan tanah oleh petugas Konstatasi	325
		- Jumlah layanan pendaftaran tanah pertama kali	1.477
		- Layanan data pendafaran tanah	16.252
		- Layanan informasi data tekstual ,	113.498

		<p>grafikal,sertipikat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan penerbitan SKPT</li> <li>- Layanan pemisahan,pemecahan dan penggabungan</li> </ul> <p>k. Jumlah laporan Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor di Provinsi</p> <p>l. Jumlah laporan Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor di Kantah</p> <p>m. Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi asset melalui fasilitas akses ke sumber-sumber produksi dan ekonomi dalam rangka membangun dan mengembangkan akses reform di Kanwil BPN Provinsi</p> <p>n. Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi asset melalui fasilitas akses ke sumber sumber produksi dan ekonomi dalam rangka membangun dan mengembangkan akses reform di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota</p>	<p>95.641</p> <p>3.598</p> <p>25.265</p> <p>1</p> <p>13</p> <p>1</p> <p>4</p>
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat melalui Pengaturan dan Penataan Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan,</b>	<p>1. Persentase kenaikan pendapatan per personal income masyarakat subjek reforma agraria</p> <p>l. Jumlah Data Tekstual dan Spasial P4TBidang Tanah Kategori II non kawasan</p> <p>m. Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah</p>	<p>58.106</p>

	<b>Penggunaan Tanah secara optimal</b>	Kategori II revisi n. Jumlah Inventarisasi Wilayah pesisir o. Jumlah laporan inventarisasi pulau-pulau kecil p. Jumlah Sertipikat Redistribusi TOL Kategori III q. Jumlah Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori III r. Peta Potensi Objek Konsolidasi kategori II (sp) s. Jumlah layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka ijin perubahan penggunaan tanah t. Jumlah layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka ijin lokasi u. Neraca PGT Kecamatan v. Jumlah inventarisasi tanah Negara bekas hak, bekas kawasan	3 4 2 2.500 200 4 99 2.347 1 1
<b>5</b>	<b>Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum</b>	1. Indek pemahaman penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan tanah 2. Persentase Tanah Instansi Pemerintah BUMN/BUMD yang terdaftar 3. Persentase meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD yang terdaftar 4. Luas cakupan Peta Zona Nilai Tanah	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>s. Jumlah laporan hasil pemutahiran data Tanah Terindikasi Terlantar di Kantor Wilayah 2</li> <li>t. Jumlah laporan hasil pemantauan dan pembinaan pertanahan di Kantor Wilayah 1</li> <li>u. Jumlah Inventarisasi dan identifikasi tanah yang terindikasi terlantar 1</li> <li>v. Jumlah laporan pengelolaan kendali mutu program pertanahan kanwil 1</li> <li>w. Jumlah laporan pengelolaan kendali mutu program pertanahan kabupaten/kota 14</li> <li>x. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pemberian hak dan perijinan di kantah 14</li> </ul>	14
7	<b>Berkurangnya Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase berkurangnya jumlah Sengketa Konflik Tanah dan Ruang</li> <li>2. Persentase berkurangnya jumlah Perkara Konflik Tanah dan Ruang</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi Sengketa Konflik Perkara (SKP) 15</li> <li>f. Jumlah laporan Pengkajian Kasus Pertanahan 22</li> <li>g. Jumlah laporan Beracara di Pengadilan 9</li> <li>h. Jumlah laporan kegiatan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 23</li> </ul>	

